Bengkulu bangun kota terpadu mandiri Lagita

BENGKULU: Pemprov Bengkulu berencana membangun kota terpadu mandiri (KTM) Lagita, yang merupakan singkatan dari Lais, Giri Mulya, dan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu Hendro Joko menyatakan sumber dana pembangunan, yaitu sebesar 30% berasal dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten (30%), dan sisanya partisipasi masyarakat dan investor (40%).

Pada tahap awal, pemerintah sudah melepaskan 60 hektare (ha) dari 120 ha luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun sejumlah fasilitas seperti pusat perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Porsi sumber dana pembangunan KTM Lagita

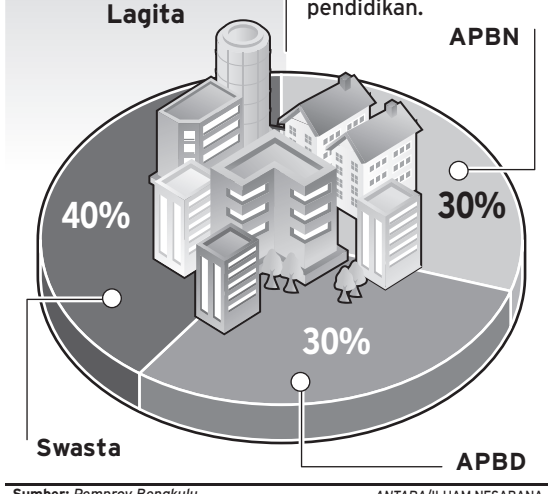

Sumber: *Pemprov Bengkulu* ANTARA/ILHAM NESABANA

'SJSN tak masuk RAPBN 2011'

Sebanyak 21,9 juta pekerja diduga tak masuk jaminan pelayanan kesehatan

OLEH R. FITRIANA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) diperkirakan menunggu pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 dan pemberian jaminan sosial hanya akan berupa bantuan langsung tunai (BLT), karena pemerintah tidak memasukkan program itu dalam RAPBN 2011.

Bahkan, pemerintah justru meningkatkan pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang berbeda dengan UU No. 40/2004 tentang SJSN pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Menurut pengamat jaminan sosial dan asuransi jiwa Odang Muchtar, belum diketahui alasan pemerintah belum memasukkan SJSN dalam rancangan anggaran pembangunan dan belanja nasional (RAPBN) 2011, selain itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga belum menyinggung pelaksanaan SJSN.

"Makna dari kebijakan presiden itu dapat diartikan pelaksanaan perlindungan kesehatan bagi sekitar 30,72 juta pekerja [dalam hubungan kerja] masih akan bertumpu pada jaminan pemeliharaan kesehatan UU No.3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," jelasnya, kemarin.

Dia menjelaskan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek, seluruh biaya dalam bentuk iuran dibayar perusahaan dan dikelola oleh PT Jamsostek (persero) yang sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mungkin nantinya menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) selaku pengelola dana amanah yang bertanggung jawab kepada presiden.

Namun, lanjutnya, masih ada pekerja yang berusaha sendiri (di luar hubungan kerja/pekerja informal) dengan perkiraan sebanyak 20,46 juta orang atau 21% dari penduduk yang bekerja, belum diatur lebih lanjut oleh pemerintah meski sudah diatur sejak 1992 dalam UU Jamsostek.

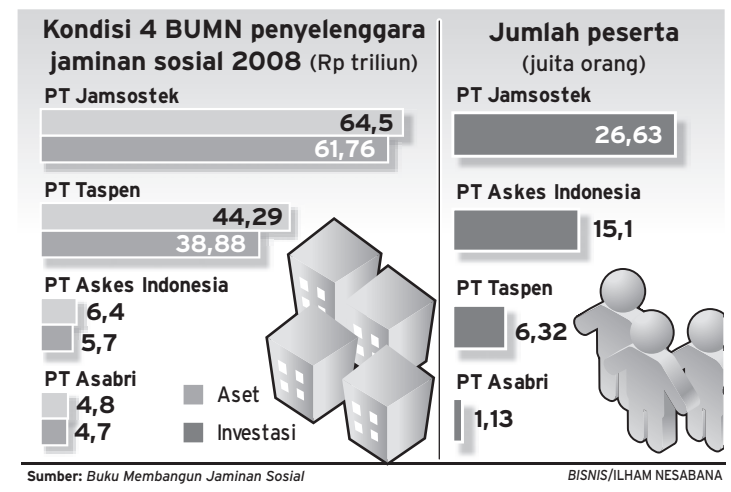

Sumber: *Buku Membangun Jaminan Sosial* BISNIS/ILHAM NESABANA

"Dengan kebijakan yang di ambil pemerintah seperti sekarang ini [dengan belum memasukkan SJSN dalam RAPBN 2011], maka sulit dipastikan seluruh penduduk Indonesia akan memperoleh akses pelayanan kesehatan *universal coverage* [secara menyeluruh]," tuturnya.

Tak dijamin

Padahal, Odang menuturkan masih ada sekitar 21,9 juta orang penduduk yang menurut data Badan Pusat Statistik pada Februari lalu berusaha/bekerja dengan dibantu orang lain yang juga membutuhkan pelayanan jaminan kesehatan.

"Yang harus menjadi perhatian adalah perbedaan mendasar antara jamkesmas dengan jamkes [jaminan kesehatan] SJSN untuk peningkatan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Dia memaparkan perbedaan mendasar itu jamkesmas lebih mengatur penggunaan APBN untuk peningkatan kesehatan keluarga miskin dan belum miskin untuk menggalang pembiayaan bagi penduduk bekerja sebagai karyawan/buruh maupun sebagian dari penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap.

Dalam jamkes SJSN lebih membangun kemandirian dengan mengajak seluruh pekerja membayar iuran sebagai dana amanah jaminan sosial walaupun bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran dan iuran itu dibayar oleh APBN.

"Perbedaan lainnya untuk mengelola anggaran puluhan triliun rupiah jamkesmas, nampaknya pemerintah akan membentuk badan baru yang sangat mungkin bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan," katanya.

Untuk jamkes SJSN, dia menambahkan anggaran penerima bantuan dan seluruh iuran peserta lainnya harus dikelola oleh BPJS yang bertanggung jawab kepada presiden. (*fitri@bisnis.co.id*)

LAYANAN

'TKI wanita rentan masalah'

JAKARTA: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menugaskan tujuh personelnya di gedung pendataan kepulangan tenaga kerja Indonesia (GPK TKI) Selapajang, Tangerang, menyusul banyaknya pekerja wanita yang ke luar negeri.

Sekitar 800-1.000 orang pekerja kembali dari bekerja luar negeri setiap hari melalui GPK TKI Selapajang dengan 5%-20% di antaranya bermasalah dan lebih dari 90% adalah TKI wanita, bahkan mayoritas TKI bermasalah adalah kaum wanita.

"Dengan melihat data itu, maka harus ada petugas pendataan dan pemantauan TKI wanita bermasalah, sama seperti halnya dibentuk petugas kesehatan yang khusus menangani masalah psikologi pekerja bermasalah," ujar Plt Deputi Bidang Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Lisna Y. Poeloengan, kemarin.

Menuru dia, sejak akhir Agustus lalu setiap harinya mereka bertugas mendata berikut memantau para TKI bermasalah, khususnya TKI wanita.

"Sebagian besar problem TKI bermasalah di GPK Selapajang dialami oleh kalangan wanita, sehingga dipandang perlu adanya petugas wanita yang mendata dan memantaunya," katanya. (*BISNIS*/TRI)

Industri MICE mulai normal

BANDUNG: Pemesanan layanan *meeting*, *incentive*, *convention*, dan *exhibition* (MICE) hotel di Bandung diduga mulai berjalan normal pada pekan depan.

Sri Nilawati, Senior Public Relations and Promotion Manager Hotel Horison Bandung, mengatakan mayoritas perusahaan pemerintah atau swasta saat ini masih larut dalam suasana Lebaran sehingga belum berencana untuk melakukan pertemuan.

Menurut dia, kalangan *corporate* masih perlu waktu untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan di hotel-hotel.

"Sekarang mayoritas perusahaan sibuk menyelenggarakan kegiatan internal, seperti halal bihalal, sehingga penggunaan MICE di hotel kami belum begitu menggembirakan hingga H+8 Idulfitri mendatang," katanya kepada *Bisnis* kemarin.

Pemesanan fasilitas *meeting room*, kata dia, mulai menunjukkan peningkatan pada Minggu, 19 September mendatang.

Hotel Horison Bandung memiliki 26 buah *meeting room*. Bahkan, lanjut dia, tingkat pemesanan MICE telah menunjukkan angka yang cukup tinggi, yakni telah mencapai lebih dari 80%. (*BISNIS*/K30)

BISNIS/ENDANG MUCHTAR

EKSPANSI JASA MARGA: Sejumlah kendaraan melintas di jalan tol dalam kota yang dikelola PT Jasa Marga Tbk, Jakarta, belum lama ini. Operator jalan tol itu akan membayar utang perbankan sebesar Rp350 miliar yang jatuh tempo tahun ini dan akan melakukan ekspansi di bidang properti melalui pengembangan kawasan di sekitar jalan tol dengan investasi sebesar Rp500 miliar.

HARGA RUMAH: Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, belum lama ini. Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa siap berdebat dengan para pengembang dan seluruh pemangku kepentingan yang mendesak penetapan baru harga rumah sejahtera.

BISNIS/WAHYU DARMAWAN

Lippo Group hati-hati garap superblok

OLEH GAJAH KUSUMO & M. SYAHRAN W. LUBIS
Bisnis Indonesia

TANGERANG: Lippo Group, khususnya PT Lippo Karawaci Tbk, belum berencana untuk mengembangkan superblok baru seiring dengan tingginya risiko untuk mengembangkan kawasan sejenis.

James Tjahaja Ryadi, Chief Executive Officer Lippo Group, mengungkapkan cadangan lahan Lippo Group saat ini berkisar 2.000 hektare dan cukup untuk membangun sebuah kawasan megasuperblok.

"Meskipun luas tersebut memungkinkan untuk membangun megasuperblok, kami belum akan merealisasikan proyek yang sedemikian besar," katanya kepada *Bisnis*, pekan lalu

Dia menilai pengembangan sebuah kawasan superblok perlu dilakukan secara hati-hati. Dia juga menyarankan pengembang di Indonesia berhati-hati dalam mengembangkan superblok, apalagi megasuperblok.

Masalahnya, kata James, dengan modal yang perlu ditanamkan begitu besar, kenyataannya di negara ini tidak tersedia skema pembiayaan jangka panjang yang menggunakan rupiah dengan tingkat bunga tetap. "Jadi, secara alamiah, risikonya besar."

Lippo Karawaci, kata James, memang tetap mengerjakan *big ticket mix used integrated development* seperti Kemang Village di Jakarta Selatan dan St. Moritz di Jakarta Barat. "Tetapi kami sangat hati-hati. Kami lebih condong mengembangkan properti yang punya nilai tambah tinggi terhadap transformasi sosial."

Seperti diketahui, PT Lippo Karawaci Tbk telah menyelesaikan megaproyek superblok St. Moritz Penthouses & Residences hingga 20% dari rencana pengembangan 11 proyek pada lahan seluas 11 hektare.

Sebelumnya, Direktur Penjualan The St. Moritz Penthouses & Residences, Budhi S Gozali, mengatakan kegiatan fisik superblok itu sudah memasuki tahap menara apartemen yang keempat.

Tiga menara di antaranya sudah memasuki pekerjaan lantai dasar dan ditargetkan akan rampung pada Oktober 2011.

Adapun menara keempat yang merupakan proyek apartemen terakhir dengan nama The New Royal, akan segera digarap dalam waktu dekat.

"Ini merupakan apartemen yang terakhir, berikutnya kami akan memasuki pekerjaan mal, kemudian hotel, dan fasilitas lainnya," ujarnya beberapa waktu lalu.

Superblok St. Moritz akan menelan dana investasi Rp11 triliun yang digarap di wilayah Puri Kembangan Jakarta Barat sejak 2008.

Lippo berniat menjadikan proyek tersebut dengan standar global. Rencananya digarap 11 jenis proyek mulai dari kantor, apartemen, mal, hotel, rumah sakit, sekolah, pusat hiburan, dan fasilitas lainnya.

Pada proyek ini juga akan berdiri gedung paling jangkung di Indonesia setinggi 65 lantai. Sejauh ini sudah digarap tiga menara apartemen dengan investasi Rp1 triliun.

Menurut Budhi, ketiga apartemen itu sudah habis terjual sehingga diluncurkan apartemen baru untuk menyambut pasar properti yang mulai membaik.

Apartemen mewah itu akan dijual seharga Rp1,5 miliar-Rp2 miliar per unit. Menurut Budhi, minat warga Indonesia dan asing untuk investasi di properti masih tinggi.

Pada saat krisis periode 2008-2009, penjualan apartemen mewah tetap berlangsung meskipun ada sedikit penurunan.

'Perhatian pemda terhadap isu-isu TKI mulai meningkat'

BISNIS INDONESIA

BANTEN: Banyak permasalahan dalam proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, mulai dari prapenempatan hingga kembali ke Tanah Air. Bahkan, sekitar 80% dari masalah itu ada di dalam negeri. Untuk mengetahui tentang hal tersebut, Bisnis *mewawancarai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)* ***Moh. Jumhur Hidayat*** *di sela-sela Safari Ramadan, baru-baru ini. Berikut petikannya:*

Bagaimana perhatian pemda terhadap TKI?

Secara keseluruhan kini ada *concern* yang meningkat dari pemerintah daerah terhadap isu-isu TKI. Ini penting, karena pemdalah yang bersentuhan langsung dengan permasalahan TKI yang hendak bekerja di luar negeri.

Bahkan, jika ada pengawasan ketat dan kesadaran yang besar dari masyarakat, serta pemda sehubungan dengan proses dokumen penempatan ke luar negeri, maka permasalahan yang timbul dapat diminalisasi.

Dengan melihat kondisi tersebut dari hasil Safari Ramadan di empat provinsi, mulai dari Sumatra Selatan, Lampung, Banten hingga Nusa Tenggara Barat, menunjukkan kampanye pemerintah pusat tentang penempatan dan perlindungan terhadap TKI sampai juga ke pemda.

Hal ini dibuktikan dengan penerimaan yang baik dari pejabat-pejabat pemda dan mereka mau melaporkan sejumlah kemajuan yang dilakukan daerah terhadap proses penempatan warganya untuk bekerja ke luar negeri.

Apa keluhan pemda tentang masalah TKI?

Ada beberapa hal yang harus segera dicari jalan keluarnya, mengenai penempatan TKI, terutama masalah koordinasi dengan instansi terkait di pusat, termasuk ada komunikasi yang intens dengan PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta).

Koordinasi tersebut dalam hal informasi yang rutin antara pemda dengan Kemenakertrans maupun BNP2TKI, sehubungan dengan warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri.

Untuk komunikasi yang rutin dengan pelaku usaha, lebih pada penyampaian informasi secara berkala kepada keluarga maupun pemda mengenai warga di daerah yang tengah bekerja di berbagai negara.

Moh. Jumhur Hidayat

Jika komunikasi dan informasi tersebut diterima pemda secara rutin, maka keberadaan warga mereka meski di luar negeri sekalipun akan terpantau, terutama jika ada permasalahan yang terjadi terhadap TKI.

Bagaimana cara mengatasinya?

Ada beberapa program yang akan dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, seperti pendirian *call center*, di mana pusat informasi tersebut tidak hanya sekadar menerima keluhan atau laporan dari keluarga TKI.

Namun, *call center* tersebut juga akan memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang disampaikan oleh TKI dan keluarganya.

Yang pasti, program itu akan direalisasikan pada tahun depan, sehingga *call center* itu tidak hanya sekadar menerima pelaporan, tetapi juga ada tindak lanjut dari laporan yang masuk.

Bagaimana peran *civil society*?

Dalam hubungannya dengan membantu penyelesaian berbagai permasalahan TKI, pemerintah berterima kasih atas perhatian *civil society*, karena tanpa mereka kadang 'tangan' pemerintah tidak sampai ke masyarakat.

Maksudnya, peran *civil society* yang besar sangat membantu tidak hanya TKI, tetapi keluarga TKI maupun para mantan TKI yang tidak mau lagi kembali bekerja di luar negeri.

Contohnya, ada pasar TKI di Desa Labuan Batu Lampung Timur, yang terdiri dari 95 kios dibangun oleh 100% dana remitansi dari TKI tanpa bantuan satu rupiah pun dari pemerintah maupun perbankan, dengan pengelola penuh para keluarga TKI.

Saya terharu dengan kegigihan keluarga TKI yang ingin memperbaiki nasib mereka dengan menyisihkan uang kiriman sanak saudaranya yang bekerja keras di luar negeri untuk membuka usaha.

Selain itu, ada peranan *civil society* yang mengikutsertakan bantuan pihak asing, yakni Australia Nusa Tenggara Assistency for Regional Authonomy (Antara) bekerja sama dengan Yayasan Tifa yang merekrut lembaga swadaya masyarakat lokal untuk membangun jaringan informasi berbasis Internet Mahnetik atau rumah Internet TKI.

Apa yang harus dilakukan pemda dan *civil society*?

Baik pemda, pemerintah pusat maupun *civil society* sudah seharusnya melakukan sinergi tidak hanya untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan terhadap TKI.

Namun, lembaga-lembaga tersebut juga memberdayakan keluarga TKI dan mantan-mantan TKI, sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidup mereka, sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Pasalnya, masyarakat Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri dengan bekerja sebagai penata laksana rumah tangga atau pekerjaan lainnya bukanlah orang-orang kaya, melainkan sebagian kurang mampu yang punya keinginan besar memperbaiki hidup mereka dan keluargnya.

Pewawancara: **R. FITRIANA**